



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SAMPANGAN SURAKARTA

NOMOR : 473.3/1722.13/VIII/2023

NOMOR : 0857/RS/PKU SAMP/VIII/2023

TENTANG


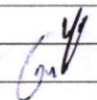
PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE BAGI PASIEN  
YANG BERSALIN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SAMPANGAN SURAKARTA  
PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. dr. DESI EKAWATI. : Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta, berkedudukan di Semanggi RT. 02 RW. 09 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta 57117 Telepon (0271) 633894, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit berkedudukan di Semanggi RT. 02 RW. 09 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta yang berwenang melaksanakan pelayanan Kesehatan dan melaksanakan verifikasi dan validasi data pasien yang bersalin di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar.

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		



Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).


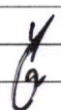


PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
PENGERTIAN  
Pasal 1

- (1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (4) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		



BAB III  
PRINSIP KERJASAMA  
Pasal 3

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4





- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* berupa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga; dan
- (2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan terpadu secara *online* adalah pasien yang bersalin di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar.

BAB V  
KEWAJIBAN PARA PIHAK  
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
  - a. memberikan *password* aplikasi pendaftaran *online* kepada PIHAK KEDUA;
  - b. memverifikasi data dan dokumen ajuan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikirim secara *online* oleh PIHAK KEDUA;
  - c. menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi pasien yang bersalin di RS PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar;
  - d. mengirimkan *QRCode* untuk cetak mandiri Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga melalui *email* PIHAK KEDUA; dan
  - e. memberikan bimbingan teknis terkait tatacara pendaftaran *online* dan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
  - a. menyerahkan Surat Pernyataan Operator kepada PIHAK KESATU;
  - b. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
  - c. mengupload berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang terdiri dari Surat Keterangan Kelahiran asli, Surat Nikah/Akta Perkawinan asli, Formulir 2.01 asli, fotocopi Kartu Keluarga, fotocopi KTP orangtua bayi, dan fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi;
  - d. mendaftarkan secara *online* penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga melalui aplikasi PIHAK KESATU;
  - e. mencetak Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga terbaru dengan kertas HVS ukuran A4 210x297 mm 80 Gsm dan menyerahkannya kepada pasien beserta *file pdf* nya untuk arsip *digital*;
  - f. menghimbau kepada pasien agar mengurus Kartu Identitas Anak di Kecamatan;
  - g. membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* melalui media *online* PIHAK KEDUA; dan
  - h. menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

BAB VI  
HAK PARA PIHAK  
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
  - a. menerima Surat Pernyataan Operator dari PIHAK KEDUA;
  - b. menerima data dan dokumen persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikirim PIHAK KEDUA secara *online*; dan
  - c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila data dan dokumen persyaratan yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		



- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- menerima *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
  - menerima *QRCode* yang dikirim melalui *email* untuk cetak mandiri Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari PIHAK KESATU; dan
  - menerima bimbingan teknis terkait tatacara pendaftaran *online* dan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

BAB VII  
JAM KERJA PELAYANAN  
Pasal 7

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- Senin – Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
- Jum'at : pukul 08.00 s/d 11.00 WIB
- Sabtu – Minggu : libur

BAB VIII  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA  
Pasal 8

- Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu dari tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2028; dan
- Apabila PIHAK KESATU menginginkan perpanjangan Kerjasama maka mengajukan surat tertulis kepada PIHAK KEDUA 2 (dua) bulan sebelum periode Perjanjian Kerjasama berakhir.

BAB IX  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA  
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :





- Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)  
Pasal 10

- Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK; dan
- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

BAB XI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 11

- Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

BAB XII  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan kelahiran secara berkala setiap akhir tahun kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sewaktu-waktu; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

BAB XIII  
LAIN-LAIN  
Pasal 13

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV  
PENUTUP  
Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan distempel resmi.

PIHAK KEDUA







dr. DESI EKAWATI

PIHAK KESATU



JUNADI PURWANTO, S.H., M.M.

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		





SEhat-aMAnah-  
taNGGungjawab-Islami

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  
KOTA SURAKARTA  
**RS PKU MUHAMMADIYAH SAMPANGAN  
SURAKARTA**

Semanggi RT 002 / RW 009, Pasar Kliwon, Surakarta 57117  
☎ 0271-633894 - Fax: 0271-630229  
Website: [www.pkusampangan.com](http://www.pkusampangan.com) || Email: [pkusampangan@gmail.com](mailto:pkusampangan@gmail.com)



**SURAT PERNYATAAN OPERATOR**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hanif Nur Kholis, A.Md.Kes.  
NIK : 3313050909960002  
Instansi : Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta  
Jabatan : Admin Paklay Komplit RS PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta

Sebagai Admin Paklay Komplit dan bertugas memberikan pelayanan pendaftaran online dokumen kependudukan, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
2. Tidak akan menyalahgunakan Password yang diberikan.
3. Berkomitmen mencegah pungutan liar dan calo.
4. Tidak akan memungut biaya apapun dalam pelayanan dokumen kependudukan.
5. Tidak akan melayani pendaftaran dokumen kependudukan diluar kewenangan yang diberikan oleh Disdukcapil Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Direktur Rumah Sakit

PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta

dr. Desi Ekawati

Surakarta, 23 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan

Hanif Nur Kholis, A.Md.Kes.